

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmadja, D. I. (2016). *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Dewata, M. F. N. & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- M, Hajar. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, B. D. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prawirohamidjojo, R. S.. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sembiring, R. (2019). *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soimin, S. (2022). *Hukum Orang dan Keluarga. Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Eman. (2019). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, Edisi Revisi 2010)*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai – Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang - Undang Nomor 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1986).

C. JURNAL

Christiani, T. A. (2016). *Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object*. Yogyakarta: Procedia – Social and Behavioral Sciences 219: 201-207. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>

Hamzani, A. I. (2015). *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Tegal: Repository Universitas Pancasakti, ISSN: 1829-7706, E-SSN: 2548-1657.

Irawan, F. P. P. & Rofiq. N. (2021). *Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Univeritas Tidar Magelang: JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1. Doi: <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/4537>

Lubis, A. Q. & Tanjung, D. (2023). *Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*. UIN Sumatera Utara Medan: Jurnal Ilmu Sosial dan

- Pendidikan (JISIP) Vol. 7, No. 2, e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944.
Doi: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4605>
- Matnuh, H. (2016). *Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*. Universitas Lambung Mangkurat: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 11.
- Mukhamad, Z. (2022). *Kajian Yuridis Permohonan Isbath Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Mkd)*. Semarang: UNISSULA Institutional Repository.
Doi: <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25783>
- Mutiary & Ramadhani, P. (2021). *Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)*. Univeristas Krisnadwipayana: Journal article: Binamulia Hukum. Doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379>
- Patampari, A. S. (2020). *Konsekuensi Hukum Pembataa*
- Pratiwi, Z. A. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*. Surabaya: Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ramadhani, A. G., dkk. (2020). *Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Praktek Pengadilan Agama Sambas*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: E-Journal Universitas Diponegoro Volume 13 Nomor 1, E-SSN: 2686-2425, ISSN: 2086-1702.
- Rifqi, M. J. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri*. Surabaya: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23, No. 2, p-ISSN 2088-2688, e-ISSN 2722-2075.
- Salsabiela, R. Prananda, R. R. (2023). *Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian*. Universitas Diponegoro: Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Nomor 2, E-ISSN: 2686-4819, P-ISSN: 2686-1607.
- Setiawan, E. (2017). *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Universitas Brawijaya Malang: Rumah Jurnal IAIN Ponorogo, Vol. 1, No. 2. Doi: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045/714>
- Sofa, Z. (2018). *Analisis Yuridis Isbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Dmk)*. Jember: Digital Repository Universitas Jember. Doi: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87766>

Ta, R. A. P., Cahyono, A. B., & Prihatini, F. (2020). *Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)*. Universitas Indonesia: Indonesian Notary, Vol 2. Doi: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/26>

D. LAIN – LAIN

Gani, A. (2017, 12 Mei). *Permohonan Isbat Nikah Bagi Pernikahan Di Bawah Tangan Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berlaku Secara Efektif*. Pengadilan Agama Pekanbaru. <https://www.pa-pekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/ISTBAT%20NIKAH%20PASCA%20UU%201%201974%20Abd%20Gani.pdf>. Diakses pada 05 Mei 2024, Pukul 20.05.

Pujianti, S. (2022, 07 September). *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>. Diakses pada 01 Mei 2024, Pukul 01.25.